

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (*outcome*) dari tiap program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Muatan informasi tentang realisasi kinerja, disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

Ketentuan pelaporan Akuntabilitas Pemerintah mengharuskan kepada setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana investasi dari pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan tujuan organisasi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Secara umum, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun perbaikan untuk penyempurnaan senantiasa diupayakan.

Bali, Pebruari 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BALI,



I WAYAN SUGIADA

Nip. 19651231 198603 1 175

KATA PENGANTAR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (*outcome*) dari tiap program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Muatan informasi tentang realisasi kinerja, disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

Ketentuan pelaporan Akuntabilitas Pemerintah mengharuskan kepada setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana investasi dari pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan tujuan organisasi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Secara umum, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun perbaikan untuk penyempurnaan senantiasa diupayakan.

Bali, Pebruari 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BALI,



I WAYAN SUGIADA

Nip. 19651231 198603 1 175

DAFTAR ISI

SAMPUL LKJiP	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. ISU-ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. KAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD	13
B. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	14
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
D. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN	17
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2024)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	22
BAB IV PENUTUP	42
A. TINJAUAN UMUM	42
B. TINJAUAN KHUSUS	42
C. SARAN	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional yang secara implicit melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan bagian integral dari system penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25) mengatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali memiliki fungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai acuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menetapkan tujuan penyelenggaraan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yaitu ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”***.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas kemudian dijabarkan secara spesifik dalam sasaran-sasaran, serta ditetapkan pada cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan merupakan target tahunan.

Dalam melaksanakan Kegiatan dan Program di tahun 2024 terdapat kendala seperti belum memadainya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang berbasis kinerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa langkah antisipatif yang ditempuh antara lain : meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan.

Dari uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa : kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada prinsipnya telah mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan.

Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Bali yang mengemban tugas Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih kreatif, memaknai berbagai tuntutan serta dinamika pembangunan maupun perubahan yang terjadi di era reformasi ini.

Untuk memenuhi ketentuan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah maka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut harus pula disampaikan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

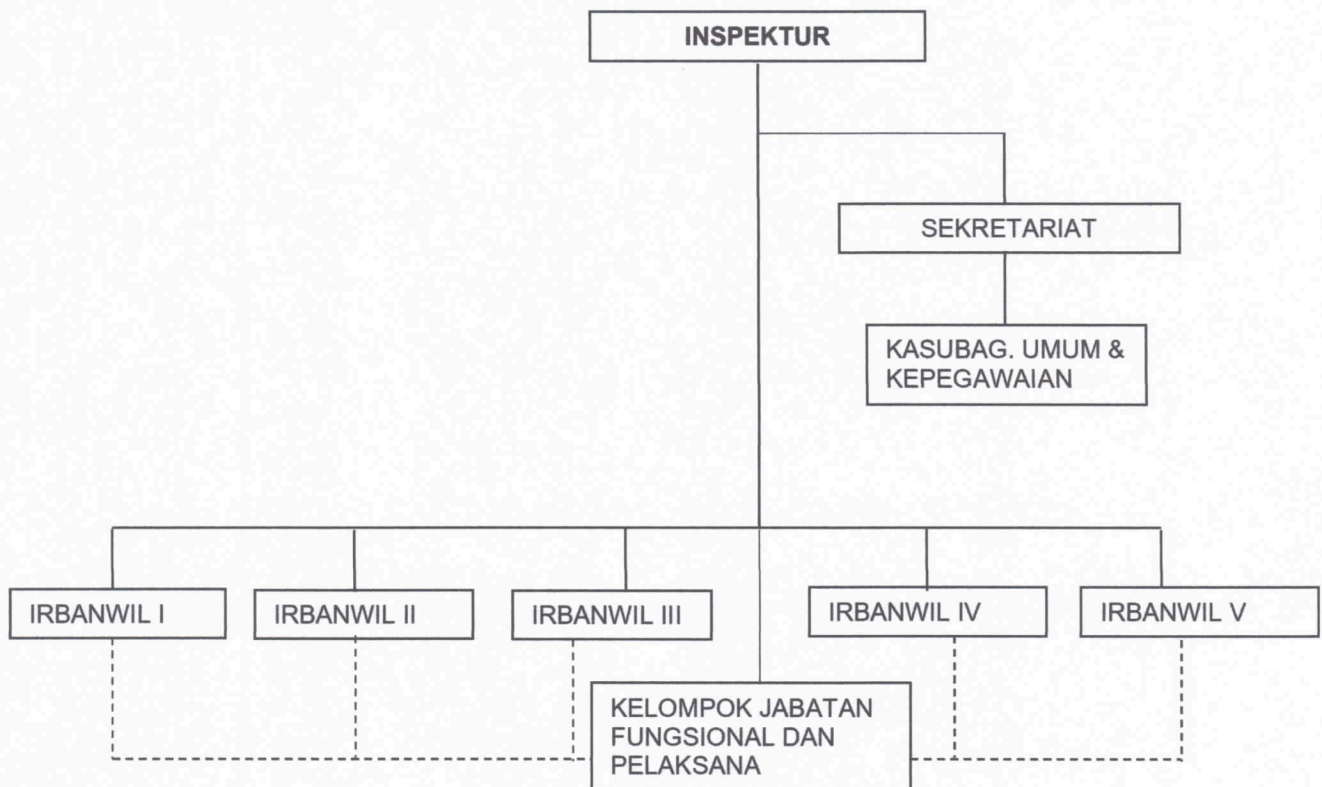
Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Daerah Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tertata dalam susunan sebagai berikut :



Keterangan :

----- adalah garis Perintah

----- adalah garis koordinasi

D. ISU – ISU STRATEGIS

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah adalah :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPIP yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Tuntutan untuk mempertahankan penilaian Opini BPK (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belum optimalnya pelayanan publik di Bidang Pengawasan.
4. Belum optimalnya Penguatan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
5. Belum optimalnya capaian pencegahan korupsi pemerintah Provinsi Bali
6. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Struktur organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali.
- 2) Kerjasama tim pada bidang pengawasan cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 3) Adanya pedoman dan SOP dalam melakukan pengawasan.
- 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Sarana dan prasarana kantor berupa meja kerja, mebeleur, dan sarana mobilitas relatif cukup memadai.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai.
- 2) Kompetensi SDM relatif masih kurang.
- 3) Disiplin dan kinerja SDM belum maksimal.
- 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memberantas KKN.
- 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
- 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

b. Tantangan (*Threats*)

- 1) Semakin kuatnya peran aparat pengawasan eksternal pemerintah.
- 2) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

3) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan belum memadai.

4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih relatif rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan (*Threats*) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factor*) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian tugas dan fungsinya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan latihan serta pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat

Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.

4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah memiliki aparat pengawas baik Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah walaupun jumlahnya belum maksimal sesuai kebutuhan.
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun jenis dan kualitasnya perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/ pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal dan eksternal. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
9. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. KAITAN RENSTRA DENGAN RPD

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (Core Busines) adalah membantu Gubernur dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah (dalam mengawal/menjaga tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan bersih).

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yaitu: **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"** dengan indikator *Indeks Reformasi Birokrasi*, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sekaligus menetapkan Tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali periode Tahun 2024-2026.

B. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai lembaga pengawas fungsional Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada era reformasi ini merupakan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah berpegang teguh pada prinsip independensi, obyektifitas, transparansi serta menjunjung tinggi etika dan moral sehingga dengan demikian diharapkan aparat

pengawasan dapat bertindak obyektif, transparan dan adil. Untuk itu harus didukung oleh manusia yang profesional dalam bidang tugasnya.

Guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka terlebih dahulu harus diciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah transparan dan akuntabel. Untuk itu manajemen pemerintah harus mengacu pada prinsip keterbukaan. Hasil pengawasan dapat diperuntukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan mengacu pada hasil kerja (Kinerja) yang terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan mendatang mengutamakan prinsip independensi etika dan moral, berlaku obyektif, berperilaku baik dan bersifat jujur.

Disamping melakukan pengawasan, aparat pengawas intern pemerintah juga melaksanakan pembinaan, sehingga aparat pengawasan intern berperan sebagai mitra bagi perangkat daerah lainnya. Untuk dapat mengemban tugas pembinaan sekaligus pengawasan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan secara matang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka **Tujuan** yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi adalah ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”***.

2. Sasaran

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan Program/ Kegiatan pemerintah sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran strategis** pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan

- b. Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP.
- d. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
- e. Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali.
- f. Terwujudnya Penguatan APIP Provinsi Bali.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, telah ditetapkan sasaran kinerja yaitu tujuan dan sasaran strategis organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Maka untuk mengukur keberhasilan capaian hasil (*Outcome*) dari masing-masing sasaran strategis di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari masing-masing sasaran tersebut yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP).
- d. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.
- e. Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali.
- f. Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali.

Keselarasannya antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Formulasi perhitungan: (jumlah kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang masuk) x 100%	Irbanwil dan Sekretariat	Laporan hasil pemeriksaan kasus	1. Pemeriksaan kasus khusus dan tujuan tertentu 2. Penanganan WBS 3. Pelaksanaan Unit Saber Pungli
2 Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Standar penilaian dari BPKP	Irbanwil dan Sekretariat	Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan Hasil Evaluasi	1. Penyelenggaraan SPIP
3 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	WTP	Irbanwil Sekretaris	LHP BPK Laporan Hasil Monev	1. Pengamalan dan pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 2. Pemeriksaan Reguler 3. Pengawasan Dana Desa 4. Pengawasan dana BOS 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah
4 Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Formulasi perhitungan: (Jumlah tindak lanjut dibagi jumlah rekomendasi) x 100%	Sekretariat	Hasil Pemutakhiran data TLHP	1. Pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan internal dan eksternal
5 Meningkatkan upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	Persentase Capaian Penilaian MCP Pemerintah Provinsi Bali	Irbanwil	OPD leading 7 Area Intervensi dalam aplikasi jaga.id	1. Evaluasi dan reviu tindak lanjut MCP KORSUPGAH KPK

6	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali	Standar Quality Assurance BPKP	Sekretariat	Apilasi PK APIP BPKP	1. Peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah 2. Penilaian PAK Jafung
---	--	---	--------------------------------	-------------	----------------------	---

D. PERENCANAAN KINERJA DALAM 3 (Tiga) TAHUN

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 3 (tiga) Tahun anggaran dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGER PER TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai hasil survei	90	90	95
2.	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Hasil Penilaian BPKP	Level III	Level III	Level IV
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase %	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Terintegrasi	Nilai Capaian	99,00	99,00	99,20
6.	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali	Level	Level III	Level III	Level IV

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2024)

Inspektorat Daerah Provinsi Bali Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana table berikut:

NO	SASARAN KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	90%
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	LEVEL III
3	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah provinsi bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%
5	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	99,00
6	Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	LEVEL III

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 28.858.814.550,-	APBD
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.331.259.160,-	APBD
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 3.832.575.880,-	APBD
JUMLAH :		Rp. 37.022.649.590,-	

Melihat table diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat.
Cara pencapaian Sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan”**, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sub kegiatan :
Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan anggaran Rp.1.214.054.820,-
2. Tercapainya sasaran Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali.
Cara pencapaian Sasaran **“Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali”**, dilaksanakan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dengan anggaran Rp.406.278.200,-
3. Tercapainya sasaran Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Cara pencapaian Sasaran **“Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP”**, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan:
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 425.059.880,-
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 250.232.480,-
 - c. Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran Rp.199.994.100,-
 - d. Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran Rp.300.115.840,-
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.900.080.880,-
 - f. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.550.275.120,-
 - g. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran Rp.299.961.500,-
 - h. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran Rp.139.725.200,-

4. Tercapainya sasaran Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu, dapat diukur dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu.

Cara pencapaian Sasaran **“Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu”**Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program penyelenggaraan pengawasan dengan sub kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran Rp.489.710.480,-
2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran Rp.145.732.480,-

5. Tercapainya sasaran Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Cara pencapaian Sasaran**“Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi Bali”**, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan sub kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan anggaran Rp.545.006.420,-
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran Rp.1.597.607.840,-
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.67.962.400,-
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.43.267.100,-
- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.22.531.187.910,-
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 49.998.700,-

- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 114.418.700,-
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 216.917.200,-
 - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 25.644.000,-
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 44.114.400,-
 - k. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 79.990.000,-
 - l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.950.494.000,-
 - m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 1.409.792.300,-
 - n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 5.100.000,-
 - o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 275.000.000,-
 - p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 306.332.640,-
 - q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 1.979.659.260,-
 - r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 558.664.280,-
 - s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.200.271.660,-
6. Tercapainya sasaran Meningkatnya upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali.
- Cara pencapaian sasaran“ **Meningkatnya upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali**”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran Rp. 699.999.800,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggung jawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024.

Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme dan fungsi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai Indeks hasil Surve	90	97,6 ✓

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level	Level III	Level III
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	4.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	%	100	99,86
5	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	5.1 Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	%	99,00	99,00
6	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	6.1 Level Kapabilitas APIP Daerah Prov. Bali	Level	Level III	Level III

Sesuai dengan table diatas dapat dijelaskan bahwa target yang dirancangkan dalam tahun 2024 untuk masing-masing sasaran strategis dengan indikator pengukurannya jika dibandingkan dengan realisasinya sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian hasil (*outcome*) yang diharapkan dalam tahun yang bersangkutan (tahun 2024) telah dapat dicapai atau diwujudkan.

2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari Indikator kinerja utama tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tahun 2023 dan tahun 2024, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	100	90	97,6	97,6
2.	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level III	Level III
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	4.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	95	100	99,86	99,86
5.	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	5.1 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Level III	Level III	Level III	Level III
6.	Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	6.1 Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	BB	BB	BB	BB
7.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	7.1 Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	-	99,00	99,00	99,00

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2024 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

NO	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN		TARGET RENSTRA	
				TAHUN 2024		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai Indeks hasil survei	90	97,6	90	97,6
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Level	Level III	Level III	Level III	Level III
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	4.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	%	100	99,86	100	99,86
5	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	5.1 Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	%	99,00	99,00	99,00	99,00
6	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	6.1 Level Kapabilitas APIP Daerah Prov. Bali	Nilai Level	Level III	Level III	Level III	Level III

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2024 telah dapat dicapai 100%. Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala atau pun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

2. Rendahnya kemauan aparaturnya pemerintah pada Perangkat Daerah untuk memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurangnya komitmen Pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan kinerja.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah :

1. Memperkuat SDM dengan menambah jumlah aparaturnya pengawas dan menyelenggarakan kediklatan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah melalui pemeriksaan, reuiu, evaluasi dan asistensi.
3. Meningkatkan dan mengingatkan komitmen pimpinan perangkat daerah melalui himbauan, arahan dan edaran Pimpinan perangkat daerah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, selalu mengedepankan prinsip :

- a. Transparan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. efisien; yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. efektif; merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- g. terukur; adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan.

Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut, dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Inspektorat Daerah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

a. Sasaran strategis 1; Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat**, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	indkes kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	90	97,6 ✓

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator **kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat** tahun 2024 adalah . Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 90 telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 97,6.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan”**, dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pengawasan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024,dengan sub kegiatan:

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu jumlah anggaran :

- Anggaran : Rp. 1.214.054.820
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 1.150.362.044 (94,75 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 63.692.776 (5,25 %)**

b. Sasaran strategis 2; Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali**, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja* prosentase penurunan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2024. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan level III telah dapat dicapai dengan tingkat capaian level III.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran **“Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali,”**, dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan **Kerjasama Pengawasan Internal, jumlah anggaran Rp. 406.278.200**

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memacu dan membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menyusun suatu sistem untuk melakukan pengendalian terhadap kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 406.278.200
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 395.889.410 (97,44 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 10.388.790 (2,56) %**

c. **Sasaran strategis 3;Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP.**

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome** Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah WTP. Hal ini dicapai dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada OPD untuk mengeliminir terjadinya temuan dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah dicapai yaitu pemberian opini dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan baik reguler, khusus dan kasus. Dengan dilakukannya pembinaan dan pemeriksaan secara rutin, diharapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset semakin tahun semakin baik dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang materiil dapat diminimalisir dan dihindari.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, dengan anggaran:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 425.059.880

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 425.059.880
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 410.149.144 (96,49 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 14.910.736 (3,51)%**

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 250.232.480

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 250.232.480
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 248.724.980 (99,40 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 1.507.500 (0,60)%**

3) Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran Rp. 199.994.100

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 199.994.100
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 171.097.668 (85,55%)
- **Sisa Anggaran : Rp. 28.896.432 (14,45%)**

4) Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran Rp. 300.115.840

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 300.115.840
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 297.219.720 (99,03 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 2.896.120 ((0,97 %)**

5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 900.080.880

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 900.080.880
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 883.547.849 (98,16 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 16.533.031 (1,84)%**

6) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 550.275.120

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 550.275.120
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 547.468.938 (99,49 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 2.806.182 (0,51 %)**

7) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 299.961.500

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 299.961.500
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 247.932.822 (82,65 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 52.028.678 (17,35 %)**

8) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran Rp. 139.725.200

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 139.725.200
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 41.393.000 (29,62 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 98.332.200 (70,38 %)**

(terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI)

d. **Sasaran Strategis 4; Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.**

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome** Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal	100%	99,86

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu Tahun Anggaran 2024 adalah 99,86.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran "**Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal**", Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran Rp. 489.710.480.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, dengan anggaran:

- Anggaran : Rp. 489.710.480
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 479.045.467 (97,82 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 10.665.013 (2,18 %)**

sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran Rp. 145.732.480

- Anggaran : Rp. 145.732.480
- Realisasi Fisik : 100 %

- Realisasi Keuangan : Rp. 143.328.800 (98,35 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 2.403.680 (1,65%)**

e. Sasaran strategis 5; Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali dengan tingkat capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali 99,00.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja nilai capaian pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2024. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan dokumen MCP dalam pencegahan dan pengawasan korupsi di Pemerintah Provinsi Bali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI. MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang meliputi 7 (tujuh) area penilaian yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah (BMD), manajemen ASN dan optimalisasi penerimaan daerah.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024, sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Korupsi dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 699.999.800
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 641.228.448 (91,60 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 58.771.352 (8,40%)**

f. Sasaran strategis 6; “Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali”

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali**, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Level III	Level III

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali* tahun 2024. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan Level III telah dapat dicapai dengan tingkat capaian Level III.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran **“Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali”**, dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pengawasan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024, **dengan jumlah anggaran :**

1. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Anggaran : Rp. 545.006.420
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 534.571.488 (98,09 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 10.434.932 (1,91%)**
2. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - Anggaran : Rp. 1.597.607.840
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.403.918.193 (87,88 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 193.689.647 (12,12%)**
3. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - Anggaran : Rp. 67.962.400
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 65.301.268 (96,08 %)

- **Sisa Anggaran** : **Rp. 2.661.132 (3,92%)**
- 4. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 43.267.100
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 41.585.600 (96,11 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 1.681.500 (3,89%)**
- 5. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Anggaran : Rp. 22.531.187.910
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 20.771.928.064 (92,19 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 1.759.259.846 (7,78%)**
- 6. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Anggaran : Rp. 49.998.700
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 40.416.000 (80,83 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 9.582.700 (19,17 %)**
- 7. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Anggaran : Rp. 114.418.700
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 95.277.200 (83,27 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 19.141.500 (16,73%)**
- 8. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Anggaran : Rp. 216.917.200
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 205.904.800 (94,92 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 11.012.400 (5,08%)**
- 9. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Anggaran : Rp. 25.644.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 22.020.000 (85,87 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 3.624.000 (14,13%)**

10. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Anggaran : Rp. 44.114.400
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 39.201.800 (88,86 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 4.912.600 (11,14 %)**
11. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Anggaran : Rp. 79.990.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 53.384.500 (66,74 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 26.605.500 (33,26 %)**
- (efisiensi sesuai tamu kantor yang dapat difasilitasi)*
12. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Anggaran : Rp. 950.494.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 813.035.154 (85,54 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 137.458.846 (14,46%)**
13. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Anggaran : Rp. 1.409.792.300
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.318.976.900 (93,56 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 90.815.400 (6,44 %)**
14. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Anggaran : Rp. 5.100.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 4.100.000 (80,39 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 1.000.000 (19,61%)**
15. Sub kegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Anggaran : Rp. 275.000.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 241.791.055 (87,92 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 33.208.945 (12,08%)**

16. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Anggaran : Rp. 306.332.640
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 242.945.700 (79,31 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 63.386.940 (20,69%)**
17. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Anggaran : Rp. 1.979.659.260
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.822.728.360 (92,07 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 156.930.900 (7,93 %)**
18. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Anggaran : Rp. 558.664.280
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 523.957.368 (93,79 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 34.706.912,00 (6,21%)**
19. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Anggaran : Rp. 200.271.660
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : Rp. 182.099.815 (90,93 %)
 - **Sisa Anggaran : Rp. 18.171.845 (9,07 %)**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : INSPEKTORAT
Tahun Anggaran : 2024



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNSIONAL)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUJU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUJU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Laku	Bulan ini	s.d. Bulan Laku	Bulan ini	s.d. Bulan Laku	Bulan ini	s.d. Bulan Laku	Bulan ini	s.d. Bulan Laku		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (8-13)
5	BELANJADIGERAK	Rp 37.022.849.890,00	Rp 19.289.608.031,00	Rp 1.482.222.035,00	Rp 20.771.928.066,00	Rp 8.878.183.827,50	Rp 770.806.016,50	Rp 7.848.901.543,00	Rp 4.929.465.760,00	Rp 32.867.790,00	Rp 5.462.455.510,00	Rp 33.893.376.117,00	Rp 3.139.274.473,00
5.1	BELANJAOPERASI	Rp 38.148.987.290,00	Rp 19.289.608.031,00	Rp 1.482.222.035,00	Rp 20.771.928.066,00	Rp 8.982.906.300,00	Rp 3.107.886.870,00	Rp 8.979.395.020,00	Rp 4.929.465.760,00	Rp 32.867.790,00	Rp 5.462.455.510,00	Rp 32.113.778.994,00	Rp 3.038.878.996,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 22.651.187.010,00	Rp 19.289.608.031,00	Rp 1.482.222.035,00	Rp 20.771.928.066,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 20.771.928.066,00	Rp 1.769.295.846,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.617.449.380,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 8.982.906.300,00	Rp 3.107.886.870,00	Rp 8.979.395.020,00	Rp 4.929.465.760,00	Rp 32.867.790,00	Rp 5.462.455.510,00	Rp 11.341.850.930,00	Rp 1.279.616.950,00
5.2	BELANJAKAPITAL	Rp 1.873.982.300,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 454.019.345,50	Rp 1.789.998.525,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.789.998.525,00	Rp 104.595.777,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp 1.409.702.300,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.126.331.000,00	Rp 192.948.000,00	Rp 1.318.978.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.318.978.000,00	Rp 99.816.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 464.280.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 189.249.277,50	Rp 201.374.345,50	Rp 450.919.023,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 450.919.023,00	Rp 13.580.377,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Inspektorat													
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 37.022.849.890,00	Rp 19.289.608.031,00	Rp 1.482.222.035,00	Rp 20.771.928.066,00	Rp 8.878.183.827,50	Rp 770.806.016,50	Rp 7.848.901.543,00	Rp 4.929.465.760,00	Rp 32.867.790,00	Rp 5.462.455.510,00	Rp 33.893.376.117,00	Rp 3.139.274.473,00
6.01.01.1.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 28.888.814.550,00	Rp 19.289.608.031,00	Rp 1.482.222.035,00	Rp 20.771.928.066,00	Rp 3.376.641.887,50	Rp 11.892.075,50	Rp 3.988.445.065,00	Rp 1.513.749.864,00	Rp 116.064.173,00	Rp 1.629.894.037,00	Rp 23.390.229.044,00	Rp 2.468.588.486,00
6.01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 111.229.800,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001	BELANJAOPERASI	Rp 87.882.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001	Belanja Barang dan Jasa	Rp 87.882.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001.001	Belanja Barang	Rp 13.484.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001.001.001	Belanja Asisten untuk Kegiatan Kantor-kantor dan Cover	Rp 881.200,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001.001.001.001	Belanja Asisten untuk Kegiatan Kantor-kantor dan Cover	Rp 882.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001.001.001.001.001	Belanja Asisten untuk Kegiatan Kantor-kantor dan Cover	Rp 180.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001.001.001.001.001.001	Belanja Asisten untuk Kegiatan Kantor-kantor dan Cover	Rp 1.94.800,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6.01.01.1.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPI/GU/TU		Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d.Bulan ini	Sisa Papan Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp65.514.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.377.548,00	Rp49.377.548,00	Rp1.136.852,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp65.514.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.377.548,00	Rp49.377.548,00	Rp1.136.852,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp43.287.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.287.100,00	Rp43.287.100,00	Rp1.081.500,00	
5.1.01.1.01.0007	Estimasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43.287.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.287.100,00	Rp43.287.100,00	Rp1.081.500,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp43.287.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.287.100,00	Rp43.287.100,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp43.287.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.287.100,00	Rp43.287.100,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.487.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.785.800,00	Rp12.785.800,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Penuh Habis	Rp14.487.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.785.800,00	Rp12.785.800,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Restitusi Kantor	Rp1.642.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.642.700,00	Rp1.642.700,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp883.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp883.200,00	Rp883.200,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp275.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.500,00	Rp275.500,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.058.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.058.700,00	Rp1.058.700,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp1.081.500,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp1.081.500,00	
0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp22.531.187,910	Rp19.289.808,031	Rp3.241,879	Rp20.771.828,084	Rp20.771.828,084	Rp20.771.828,084	Rp20.771.828,084	Rp17.969.289,848	
0.01.01.1.02.0001	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp22.531.187,910	Rp19.289.808,031	Rp3.241,879	Rp20.771.828,084	Rp20.771.828,084	Rp20.771.828,084	Rp20.771.828,084	Rp17.969.289,848	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp65.514.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.377.548,00	Rp49.377.548,00	Rp1.136.852,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp19.289.808,031	Rp19.289.808,031	Rp3.241,879	Rp19.289.808,031	Rp19.289.808,031	Rp19.289.808,031	Rp19.289.808,031	Rp17.969.289,848	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp7.788.922,471	Rp7.788.922,471	Rp1.081,500	Rp7.788.922,471	Rp7.788.922,471	Rp7.788.922,471	Rp7.788.922,471	Rp7.788.922,471	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp5.370.058,872	Rp5.370.058,872	Rp730,950	Rp5.370.950,945	Rp5.370.950,945	Rp5.370.950,945	Rp5.370.950,945	Rp5.370.950,945	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp5.381.358,872	Rp5.381.358,872	Rp730,950	Rp5.382.089,822	Rp5.382.089,822	Rp5.382.089,822	Rp5.382.089,822	Rp5.382.089,822	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp1.417.519,599	Rp1.417.519,599	Rp350,920	Rp1.418.030,920	Rp1.418.030,920	Rp1.418.030,920	Rp1.418.030,920	Rp1.418.030,920	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keuangan ASN	Rp17.909.879,560	Rp17.909.879,560	Rp2.160,929	Rp17.912.040,489	Rp17.912.040,489	Rp17.912.040,489	Rp17.912.040,489	Rp17.912.040,489	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keuangan PPPK	Rp1.002.000,000	Rp1.002.000,000	Rp100,000	Rp1.002.100,000	Rp1.002.100,000	Rp1.002.100,000	Rp1.002.100,000	Rp1.002.100,000	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp16.907.879,560	Rp16.907.879,560	Rp2.060,929	Rp16.910.040,489	Rp16.910.040,489	Rp16.910.040,489	Rp16.910.040,489	Rp16.910.040,489	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp15.440.000,000	Rp15.440.000,000	Rp1.960,929	Rp15.441.960,929	Rp15.441.960,929	Rp15.441.960,929	Rp15.441.960,929	Rp15.441.960,929	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp25.882.000,000	Rp25.882.000,000	Rp49,000	Rp25.882.049,000	Rp25.882.049,000	Rp25.882.049,000	Rp25.882.049,000	Rp25.882.049,000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp24.842.000,000	Rp24.842.000,000	Rp49,000	Rp24.842.049,000	Rp24.842.049,000	Rp24.842.049,000	Rp24.842.049,000	Rp24.842.049,000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran		SPJ - LS Onj		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UP/UMTU		Jumlah Rp/LS + UP/UMTU s.d. Belanja	Sisa Pagi Anggaran
		s.d. Belanja	Bulan Ini	s.d. Belanja	Bulan Ini	s.d. Belanja	Bulan Ini	s.d. Belanja	Bulan Ini		
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 1.050.000,00	Rp 990.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.050.000,00	Rp 0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 4.875.000,00	Rp 4.028.000,00	Rp 4.875.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 4.875.000,00	Rp 1.295.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 4.875.000,00	Rp 4.028.000,00	Rp 4.875.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 4.875.000,00	Rp 1.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 235.795.480,00	Rp 16.032.860,00	Rp 235.795.480,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 235.795.480,00	Rp 1.487.420,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 235.795.480,00	Rp 16.032.860,00	Rp 235.795.480,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 235.795.480,00	Rp 1.487.420,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 885.000,00	Rp 79.960,00	Rp 885.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 885.000,00	Rp 1.441.480,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 5.187.195,00	Rp 1.405.425,00	Rp 5.187.195,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.187.195,00	Rp 15.900,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulanan Gaji ASN	Rp 5.187.195,00	Rp 2.351.831,00	Rp 5.187.195,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.187.195,00	Rp 1.429.885,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulanan Gaji PNS	Rp 5.187.195,00	Rp 2.351.831,00	Rp 5.187.195,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.187.195,00	Rp 1.429.885,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulanan Gaji PPPK	Rp 10.300,00	Rp 97,00	Rp 10.300,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 10.300,00	Rp 1.429.885,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 5.206.400,00	Rp 483.037,337,00	Rp 5.206.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.206.400,00	Rp 28.130.825,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 5.206.400,00	Rp 483.037,337,00	Rp 5.206.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.206.400,00	Rp 28.130.825,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK	Rp 1.183.083,00	Rp 44.301,00	Rp 1.183.083,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.183.083,00	Rp 27.380.920,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	Rp 16.027.601,00	Rp 10.074.707,00	Rp 16.027.601,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 16.027.601,00	Rp 5.048.433,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 16.027.601,00	Rp 10.074.707,00	Rp 16.027.601,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 16.027.601,00	Rp 5.048.433,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK	Rp 1.000,00	Rp 981,00	Rp 1.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.000,00	Rp 5.048.433,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Pasia Tabungan Pemutihan Rejeki ASN	Rp 38.082.872,00	Rp 2.714.345,00	Rp 38.082.872,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 38.082.872,00	Rp 5.048.433,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Pasia Tabungan Pemutihan Rejeki PNS	Rp 38.082.872,00	Rp 2.714.345,00	Rp 38.082.872,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 38.082.872,00	Rp 5.048.433,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Pasia Tabungan Pemutihan Rejeki PPPK	Rp 900.000,00	Rp 0,00	Rp 900.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 900.000,00	Rp 5.048.433,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 14.971.856.430,00	Rp 12.118.904.725,00	Rp 14.971.856.430,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 14.971.856.430,00	Rp 10.456.542.331,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	Rp 1.325.923.804,00	Rp 751.608.701,00	Rp 1.325.923.804,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.325.923.804,00	Rp 1.026.788.413,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	Rp 1.325.923.804,00	Rp 751.608.701,00	Rp 1.325.923.804,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.325.923.804,00	Rp 1.026.788.413,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	Rp 885.933.925,00	Rp 775.179.285,00	Rp 885.933.925,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 885.933.925,00	Rp 852.332.188,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	Rp 885.933.925,00	Rp 775.179.285,00	Rp 885.933.925,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 885.933.925,00	Rp 852.332.188,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	Rp 885.933.925,00	Rp 775.179.285,00	Rp 885.933.925,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 885.933.925,00	Rp 852.332.188,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	Rp 885.933.925,00	Rp 775.179.285,00	Rp 885.933.925,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 885.933.925,00	Rp 852.332.188,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	Rp 4.855.907.911,00	Rp 4.035.511.755,00	Rp 4.855.907.911,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 4.855.907.911,00	Rp 3.933.941.720,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN	Rp 4.855.907.911,00	Rp 4.035.511.755,00	Rp 4.855.907.911,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 4.855.907.911,00	Rp 3.933.941.720,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	Rp 4.855.907.911,00	Rp 4.035.511.755,00	Rp 4.855.907.911,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 4.855.907.911,00	Rp 3.933.941.720,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja Lainnya	Rp 3.700.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.700.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.700.000,00	Rp 4.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Revisi			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPRUMUTU			Jumlah SPJ (LS + UPRUMUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
5.1.01.05.07	Belanja Honorarium	Rp57.000.000,00	Rp44.850.000,00	Rp6.850.000,00	Rp51.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.300.000,00	Rp5.700.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp37.000.000,00	Rp44.850.000,00	Rp6.850.000,00	Rp51.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.300.000,00	Rp5.700.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Jasa Pengalihan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00
5.1.01.05.08.0002	Belanja Jasa Pengalihan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00
0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.481.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.481.277.000,00	Rp0,00
0.01.01.1.06.0001	Persediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp19.888.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.888.700,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp19.888.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.888.700,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.888.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.888.700,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.888.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.888.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian	Rp19.888.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.888.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0081	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Aktifistik	Rp19.888.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.888.700,00	Rp0,00
0.01.01.1.06.0002	Persediaan Perakalan dan Perangkat Kantor	Rp114.418.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.418.700,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp114.418.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.418.700,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp114.418.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.418.700,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp114.418.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.418.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian	Rp20.278.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.278.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0084	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Aktifistik	Rp19.178.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.178.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0085	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp74.479.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.479.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0089	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp18.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0090	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Perabot/Kantor	Rp218.917.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.917.200,00	Rp0,00
0.01.01.1.06.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Rp218.917.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.917.200,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp218.917.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.917.200,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp180.257.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.257.200,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp180.257.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.257.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian	Rp2.881.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.881.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0089	Belanja Bahan-Hi-Tabung Pemadam Kebakaran	Rp7.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.923.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Hi-Tabung Gas	Rp108.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.226.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0089	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Atributif untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0084	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Rejpi			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPB/UTU			Jumlah SPJ (LS + UPB/UTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0.180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.180.000.00	Rp0.795.000.00
5.1.02.04	Belanja Sewa Perakitan dan Mas in	Rp0.180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.180.000.00	Rp0.795.000.00
5.1.02.04.01.106.0000	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp0.180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.180.000.00	Rp0.795.000.00
5.1.02.04.01.106.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Rp0.180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.180.000.00	Rp0.795.000.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.844.000.00	Rp0.824.000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.844.000.00	Rp0.824.000.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.844.000.00	Rp0.824.000.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pekar Habis	Rp0.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.844.000.00	Rp0.824.000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Aneka-Bahan untuk Kegiatan Kantor-AktTulis Kantor	Rp0.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.844.000.00	Rp0.824.000.00
5.1.02.01.01.0024	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-Undangan	Rp0.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.844.000.00	Rp0.824.000.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0.414.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.414.400.00	Rp0.912.800.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.414.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.414.400.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0.414.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.414.400.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0.414.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.414.400.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Langganan Jurnalis/Gurat Kabar/Majalah	Rp0.414.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.414.400.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.106.0000	Perilaku Konsumsi Tamu	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pekar Habis	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.01.0083	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp0.990.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.990.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.106.0000	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Rp0.484.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.484.000.00	Rp0.912.800.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0.984.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.984.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.984.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.984.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.984.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.984.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pekar Habis	Rp0.984.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.984.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0.984.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.984.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0.808.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.808.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0.808.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.808.000.00	Rp0.912.800.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0.808.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.808.000.00	Rp0.912.800.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS CMI		SPJ - LS Barring & Jasa		SPJ - UPT/BAUTU		Jumlah SPJ (LS + UPT/BAUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini		
0.01.01.1.07.0010	Pengadaan Barang M&A Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.409.792.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.129.331.000,00	Rp 292.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.318.976.000,00	Rp0.815.400,00
0.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.409.792.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.129.331.000,00	Rp 292.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.318.976.000,00	Rp0.815.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barring dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barring	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barring Tidak Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0000	Belanja Akarbanan untuk kegiatan Kantor-Kantor/Kantor	Rp 1.409.792.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.129.331.000,00	Rp 292.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.318.976.000,00	Rp0.815.400,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp 1.409.792.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.129.331.000,00	Rp 292.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.318.976.000,00	Rp0.815.400,00
5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	Rp 1.409.792.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.129.331.000,00	Rp 292.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.318.976.000,00	Rp0.815.400,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkut	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kondrasan Bermotor Beroda Dua	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bangkai dan Alat Ukur	Rp 19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 11.500.000,00	Rp 1.395.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 12.895.000,00	Rp0.105.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	Rp 19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 11.500.000,00	Rp 1.395.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 12.895.000,00	Rp0.105.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	Rp 19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 11.500.000,00	Rp 1.395.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 12.895.000,00	Rp0.105.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tinggal	Rp 939.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 877.800,00	Rp 91.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 969.080,00	Rp 19.480.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp 847.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 877.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 877.800,00	Rp 19.100,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Keras Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 847.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 877.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 877.800,00	Rp 19.100,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Rumah Tinggal	Rp 939.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 161.000.000,00	Rp 91.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 252.280.000,00	Rp 17.810.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp 208.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 14.200.000,00	Rp 191.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 205.480.000,00	Rp 14.100.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Pernting	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tinggal Lainnya (Home Use)	Rp 150.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 139.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 139.800.000,00	Rp 14.100.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	Rp 733.958.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 720.184.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 720.184.300,00	Rp 13.731.800,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp 733.958.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 720.184.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 720.184.300,00	Rp 13.731.800,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Perbaikan Studio Audio	Rp 13.985.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp 720.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 711.884.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 711.884.300,00	Rp 11.731.800,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp 289.499.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 237.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 237.000.000,00	Rp 11.999.300,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perbaikan Komputer	Rp 289.499.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 237.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 237.000.000,00	Rp 11.999.300,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perbaikan Personal Computer	Rp 289.499.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 237.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 237.000.000,00	Rp 11.999.300,00
0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 669.432.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 609.083.300,00	Rp 30.968.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 639.051.750,00	Rp 27.969.895,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Onqj		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPDUTU		Jumlah SPJ (LS + UPDUTU) s.d Bilan Inl	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bilan Inl	s.d Bilan Laku	Bahan Inl	Bahan Laku	s.d Bilan Inl	s.d Bilan Laku		
0.01.01.1.026.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.100.000.00	Rp1.000.000.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.100.000.00	Rp1.000.000.00
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.100.000.00	Rp1.000.000.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang	Rp4.920.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.100.000.00	Rp820.000.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp4.920.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.100.000.00	Rp820.000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp180.000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp180.000.00
5.1.02.02.01.0084	Belanja Paket/Pengiriman	Rp180.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp180.000.00
5.01.01.1.026.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp275.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp222.894.400.00	Rp52.105.600.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp275.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp222.894.400.00	Rp52.105.600.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp275.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp222.894.400.00	Rp52.105.600.00
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp275.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp222.894.400.00	Rp52.105.600.00
5.1.02.02.01.0089	Belanja Tagihan Telepon	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp9.000.000.00
5.1.02.02.01.0090	Belanja Tagihan Air	Rp9.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.00	Rp9.000.000.00
5.1.02.02.01.0091	Belanja Tagihan Listrik	Rp266.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp213.894.400.00	Rp52.105.600.00
5.01.01.1.026.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp300.332.440.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp234.772.696.00	Rp65.559.744.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp300.332.440.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp234.772.696.00	Rp65.559.744.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp300.332.440.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp234.772.696.00	Rp65.559.744.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp75.438.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp75.438.800.00	Rp75.438.800.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Jasa Habis	Rp75.438.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp75.438.800.00	Rp75.438.800.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp75.438.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp75.438.800.00	Rp75.438.800.00
5.1.02.01.01.0090	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot/Kantor	Rp5.647.200.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.647.200.00	Rp5.647.200.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp230.892.640.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp158.334.496.00	Rp72.558.144.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp230.892.640.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp158.334.496.00	Rp72.558.144.00
5.1.02.02.01.0090	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp17.508.456.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.508.456.00	Rp17.508.456.00
5.1.02.02.02.0095	Belanja Luran Jaminan Kesehatan	Rp9.418.896.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.418.896.00	Rp9.418.896.00
5.1.02.02.02.0098	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp480.216.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp480.216.00	Rp480.216.00
5.1.02.02.02.0097	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp9.077.768.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.077.768.00	Rp9.077.768.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.418.632.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.418.632.00	Rp1.418.632.00

Kode Rekening	Uraian	SPJ - L5 Opsi		SPJ - L5 Barang & Jasa		SPJ - UP/BU/PTU		Jumlah SPJ (L5 + UP/BU/PTU s.d Bulan Ini)	Sisa Page Anggaran
		Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
0.01.01.1.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemertintahan Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.239.029,00	Rp2.134.443.743,00	Rp392.341.800,00	Rp2.000.000,00	Rp2.394.185.543,00	Rp106.800.000,00
0.01.01.1.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paksi dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.523.210,00	Rp1.532.096.590,00	Rp280.832.800,00	Rp0,00	Rp1.812.728.390,00	Rp106.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.523.210,00	Rp1.532.096.590,00	Rp280.832.800,00	Rp0,00	Rp1.812.728.390,00	Rp106.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.523.210,00	Rp1.532.096.590,00	Rp280.832.800,00	Rp0,00	Rp1.812.728.390,00	Rp106.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp449.039.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.039.200,00	Rp449.039.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Konstr	Rp423.376.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.376.979,00	Rp449.039.200,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp104.292.162,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.162,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp208.864.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.864.384,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pambayaran Paksi, Bks, dan Perizinan	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp449.039.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Akuansi	Rp29.292.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.292.884,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp13.376.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.376.884,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp7.292.324,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.292.324,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp11.629,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.629,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Han'us bagi Non-ASN	Rp11.243.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.243.449,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp439.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Aksin	Rp439.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.200.000,00	Rp0,00
0.01.01.1.06.0009	Pemeliharaan/Rahabstatis / Oesung Konstr dan Bangunan Lainnya	Rp659.694.380,00	Rp0,00	Rp27.489.035,50	Rp5.161.513.369,00	Rp5.144.000,00	Rp2.000.000,00	Rp692.332.980,50	Rp31.706,812,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp44.494.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.494.380,00	Rp21.128.839,00
5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.494.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.494.380,00	Rp21.128.839,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa	Rp79.394.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.394.380,00	Rp21.128.839,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp69.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.528.128,00	Rp21.128.839,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Akuansi	Rp9.866.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.866.252,00	Rp21.128.839,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.982,00	Rp21.128.839,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp152.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.072,00	Rp21.128.839,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Caji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GRU			Jumlah SPJ (LS + UP/GRU) s.d. Blansi	Sisa Pegu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp202.984.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.882.00	Rp177.201.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp177.201.00	Rp85.232.00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non-ASN	Rp2.488.544.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp309.212.00	Rp2.189.226.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.189.226.00	Rp12.318.00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp19.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.969.000.00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp19.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.969.000.00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Temporal Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp19.100.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.969.000.00	
5.2	SELANJUTADAL	Rp61.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp291.374.345.60	Rp450.919.823.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.919.823.00	Rp19.960.377.00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp61.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp291.374.345.60	Rp450.919.823.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.919.823.00	Rp19.960.377.00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp61.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp291.374.345.60	Rp450.919.823.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.919.823.00	Rp19.960.377.00	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Temporal Kerja	Rp61.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp291.374.345.60	Rp450.919.823.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.919.823.00	Rp19.960.377.00	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp61.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp291.374.345.60	Rp450.919.823.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp450.919.823.00	Rp19.960.377.00	
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Jarak Posa Jaga	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
6.01.01.1.06.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi: Sewa dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp209.271.680.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12.227.980.00	Rp182.049.815.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp182.049.815.00	Rp19.171.845.00	
5.1	SELANJUTADAL	Rp209.271.680.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12.227.980.00	Rp182.049.815.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp182.049.815.00	Rp19.171.845.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp209.271.680.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12.227.980.00	Rp182.049.815.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp182.049.815.00	Rp19.171.845.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp89.891.980.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12.227.980.00	Rp85.534.815.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp85.534.815.00	Rp0.008.848.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp81.782.816.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.254.888.00	Rp78.969.144.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp78.969.144.00	Rp0.813.872.00	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp81.782.816.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.254.888.00	Rp78.969.144.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp78.969.144.00	Rp0.813.872.00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Kuransi	Rp8.998.844.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.488.544.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp309.212.00	Rp2.189.226.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.189.226.00	Rp12.318.00	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp6.509.299.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp238.348.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non-ASN	Rp2.989.299.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp11.890.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.890.000.00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Meran	Rp11.890.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.890.000.00	
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp11.890.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.890.000.00	
5.1.02.03.02.03.117		Rp0.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.000.000.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran		SPJ - LS Daji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPURUTU		Jumlah SPJ (LS + UPURUTU s.d. Bulan)	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Ini	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Ini	Bulan ini		
5.1.02.01.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Peninggalan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.995.000,00	Rp0,00	Rp28.995.000,00	Rp.485.000,00
5.1.02.01.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.530.000,00	Rp0,00	Rp7.530.000,00	Rp6.175.000,00
5.1.02.01.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Studio Lainnya	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00,00
5.1.02.01.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer-Lain-Peralatan Personal Computer	Rp33.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.305.000,00	Rp0,00	Rp27.305.000,00	Rp6.275.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.08	Belanja Modal/Asat Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.08.01	Belanja Modal/Asat Lainnya-Asat Tidak Berwujud	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.08.01.01	Belanja Modal/Asat Tidak Berwujud	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.08.01.01.0008	Belanja Modal/Asat Tidak Berwujud-Software	Rp4.331.280.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.963.698.220,00	Rp0,00	Rp1.963.698.220,00	Rp2.367.581.940,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGAAN DAN PELAKSANAAN	Rp2.871.471.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.387.716.899,00	Rp0,00	Rp1.387.716.899,00	Rp1.483.674.991,00
6.01.02.1.01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	Rp428.059.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.356.118,00	Rp0,00	Rp242.356.118,00	Rp185.703.772,00
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemertintah Daerah	Rp25.959.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.870.398,00	Rp0,00	Rp12.870.398,00	Rp13.089.492,00
5.1	BELANJA OPERASIB	Rp235.059.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.890.004,00	Rp0,00	Rp162.890.004,00	Rp72.169.886,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp235.059.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.870.398,00	Rp0,00	Rp192.870.398,00	Rp39.019.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.345.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.111.990,00	Rp0,00	Rp25.111.990,00	Rp7.228.610,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.345.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.345.600,00	Rp0,00	Rp2.345.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor dan Cover	Rp2.345.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.345.600,00	Rp0,00	Rp2.345.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.087.260,00	Rp0,00	Rp1.087.260,00	Rp682.740,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.394.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.394.290,00	Rp0,00	Rp75.394.290,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.828.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.828.128,00	Rp0,00	Rp69.828.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.828.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.828.128,00	Rp0,00	Rp69.828.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Kontribusi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.982,00	Rp0,00	Rp2.972.982,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp162.072,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp202.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.910,00	Rp0,00	Rp202.910,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Luran Jaminan Hari Tua bagi Non-ASN	Rp2.498.844,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.498.844,00	Rp0,00	Rp2.498.844,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Saji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPKUTU		Jumlah SPJ (LS + UPKUTU) s.d.Bulan ini	Sisa Pagi Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp17.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.880.000,00	Rp0,00	Rp139.258.054,00	Rp113.172.900,00	Rp305.558.014,00	Rp10.793.988,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.880.000,00	Rp0,00	Rp139.258.054,00	Rp113.172.900,00	Rp305.558.014,00	Rp10.793.988,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.880.000,00	Rp0,00	Rp139.258.054,00	Rp113.172.900,00	Rp305.558.014,00	Rp10.793.988,00
5.1.02.04.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp50.232.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.124.280,00	Rp0,00	Rp38.140.140,00	Rp38.140.140,00	Rp259.284.420,00	Rp10.968.980,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.232.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.124.280,00	Rp0,00	Rp38.140.140,00	Rp38.140.140,00	Rp259.284.420,00	Rp10.968.980,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.232.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.124.280,00	Rp0,00	Rp38.140.140,00	Rp38.140.140,00	Rp259.284.420,00	Rp10.968.980,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.242.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.822.500,00	Rp0,00	Rp10.822.500,00	Rp10.818.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis	Rp1.242.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.822.500,00	Rp0,00	Rp10.822.500,00	Rp10.818.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb-ArtTulis Kamb	Rp1.004.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.004.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb- Keras dan Cover	Rp1.154.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.007.500,00	Rp0,00	Rp1.007.500,00	Rp0.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb-Benda Pns	Rp24.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb-Bahan Komputer	Rp783.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp783.000,00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp19.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000,000,00	Rp0,00	Rp0.000,000,00	Rp19.090.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.984.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.984.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.984.280,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kamb	Rp95.828.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.828.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.828.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp95.828.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.828.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.828.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Buansisi	Rp5.898.182,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.898.182,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.898.182,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.882,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.882,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.882,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp182.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.072,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp202.594,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.594,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.594,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non-ASN	Rp15.228.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.228.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.228.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp15.828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.828.000,00	Rp0,00	Rp27.817.840,00	Rp27.817.840,00	Rp43.655.840,00	Rp348.390,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp15.828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.828.000,00	Rp0,00	Rp27.817.840,00	Rp27.817.840,00	Rp43.655.840,00	Rp348.390,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.828.000,00	Rp0,00	Rp27.817.840,00	Rp27.817.840,00	Rp43.655.840,00	Rp348.390,00
5.1.02.04.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Rp99.994.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.828.028,00	Rp182.828.028,00	Rp282.828.028,00	Rp99.994.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp99.994.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.828.028,00	Rp182.828.028,00	Rp282.828.028,00	Rp99.994.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp99.994.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.828.028,00	Rp182.828.028,00	Rp282.828.028,00	Rp99.994.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.394.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.215.300,00	Rp13.215.300,00	Rp32.609.400,00	Rp178.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis	Rp19.394.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.215.300,00	Rp13.215.300,00	Rp32.609.400,00	Rp178.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb-ArtTulis Kamb	Rp3.823.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.823.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb- Keras dan Cover	Rp2.828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.152.500,00	Rp2.152.500,00	Rp4.981.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamb-Benda Pns	Rp120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00

Kode Rekening	Uraian	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPI/BUKU		Jumlah SPJ (LS + UPI/BUKU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagar Anggaran
		s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kambor-Bahan Komputer	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.781.400.00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.781.400.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembaawa Acara, dan Panitia	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp180.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp102.269.728.00	Rp143.000.000.00	Rp146.412.728.00	Rp31.187.272.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp180.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp102.269.728.00	Rp143.000.000.00	Rp146.412.728.00	Rp31.187.272.00
5.1.02.04.01.0091	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp180.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp102.269.728.00	Rp143.000.000.00	Rp146.412.728.00	Rp31.187.272.00
5.1.02.04.01.0094	Revisi Laporan Keuangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp184.308.140.00	Rp0.00	Rp184.308.140.00	Rp0.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp300.115.840.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp110.842.140.00	Rp0.00	Rp110.842.140.00	Rp0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp300.115.840.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp110.842.140.00	Rp0.00	Rp110.842.140.00	Rp0.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp40.107.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp40.107.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kambor-Ati/Tulis Kantor	Rp1.287.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kambor-Kertas dan Cover	Rp1.025.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kambor-Benda Pns	Rp268.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kambor-Bahan Komputer	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp39.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp37.882.140.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp34.784.004.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	Rp2.018.076.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.488.476.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi NonASN	Rp1.548.276.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp222.228.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp222.228.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp222.228.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0005	Pengawasan Umum dan Timin's Kabupaten/Volva	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Onji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPGRADE		Jumlah SPJ (LS + UPGRADE) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Laba	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Laba		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.000.000.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.000.000.000.000	Rp0.000.000.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp108.200.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp108.200.000.000	Rp108.200.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian	Rp108.200.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp108.200.000.000	Rp108.200.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Art/Tulis Kantor	Rp5.882.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.882.000.000	Rp5.882.000.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover	Rp21.075.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp21.075.000.000	Rp21.075.000.000
5.1.02.01.01.0007	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp240.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp240.000.000	Rp240.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp19.308.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.308.000.000	Rp19.308.000.000
5.1.02.01.01.0022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.820.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.820.000.000	Rp1.820.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp78.384.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp78.384.200.000	Rp78.384.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp8.826.120.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.826.120.000	Rp8.826.120.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp9.826.120.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.826.120.000	Rp9.826.120.000
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Auransi	Rp69.836.182.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp69.836.182.000	Rp69.836.182.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.952.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.972.952.000	Rp2.972.952.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp182.072.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp182.072.000	Rp182.072.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp322.694.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp322.694.000	Rp322.694.000
5.1.02.02.02.0010	Belanja Luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.488.844.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.488.844.000	Rp2.488.844.000
5.1.02.04	Belanja Pajalean Dinas	Rp7.165.14.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.165.14.000.000	Rp7.165.14.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Pajalean Dinas Dalam Negeri	Rp7.165.14.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.165.14.000.000	Rp7.165.14.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Pajalean Dinas Biasa	Rp7.165.14.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.165.14.000.000	Rp7.165.14.000.000
5.1.02.04.01.0009	Kerjasama Pengiriman Internal	Rp409.278.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp409.278.200.000	Rp409.278.200.000
5.1	BELANJA OPERASIONAL	Rp409.278.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp409.278.200.000	Rp409.278.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp409.278.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp409.278.200.000	Rp409.278.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.000.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakaian	Rp2.000.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Art/Tulis Kantor	Rp9.823.800.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.823.800.000	Rp9.823.800.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover	Rp2.768.400.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.768.400.000	Rp2.768.400.000
5.1.02.01.01.0007	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp180.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp180.000.000	Rp180.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.889.200.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.889.200.000	Rp4.889.200.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Atributif untuk Kegiatan Kantor-Atributif Kantor Lainnya	Rp1.500.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp19.889.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19.889.000.000	Rp19.889.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp9.000.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.000.000.000	Rp9.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Caji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPGRADE		Jumlah SPJ (LS + UPGRADE) s.d. Binaan Int	Sisa Page Anggaran
			s.d. Binaan Laku	Balok Int	s.d. Binaan Laku	Balok Int	s.d. Binaan Int	Balok Int		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp25.212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp25.212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Bina	Rp382.12.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp0,00
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Rp480.210.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.338.880,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp22.566.260,00	Rp10.069.013,00
5.1	SELANJUTNYA	Rp480.210.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.338.880,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp22.566.260,00	Rp10.069.013,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp480.210.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.338.880,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp22.566.260,00	Rp10.069.013,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.784.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok	Rp32.784.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas/Tulis Kantor	Rp3.848.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover	Rp0.882.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp3.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pns	Rp420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.481.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Meubel dan Meubel Rangkap	Rp14.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.884.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp12.227.380,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0.038.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp0.038.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.272.882,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.477.440,00	Rp0.095.492,00	Rp0.095.492,00	Rp0.095.492,00	Rp0.095.492,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kesehatan Kega bagi Non ASN	Rp182.972,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.080,00	Rp27.012,00	Rp27.012,00	Rp27.012,00	Rp27.012,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp202.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.920,00	Rp33.764,00	Rp33.764,00	Rp33.764,00	Rp33.764,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.488.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.120,00	Rp0.418.424,00	Rp0.418.424,00	Rp0.418.424,00	Rp0.418.424,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Bina	Rp1.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.01.02.1.02	Peningkatan Penguasaan dengan Tujuan tertentu	Rp1.582.287.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	SELANJUTNYA	Rp1.582.287.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.582.287.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Opsi		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPGRADE		Jumlah SPJ (LS + UPGRADE) s.d. Bulan Ini	Sisa Peng Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.410.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,041.300,00	Rp1.388.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis	Rp7.410.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,041.300,00	Rp1.388.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor-AktTulis Kambor	Rp1.738.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.108.800,00	Rp268.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor- Kertas dan Cover	Rp761.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor- Bahan Cetak	Rp238.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor-Benda Pos	Rp192.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor-Bahan Komputer	Rp2.866.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.108.000,00	Rp269.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.766.000,00	Rp4.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp78.954.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.227.390,00	Rp76.944.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.954.280,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp49.826.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.273.440,00	Rp9.528.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.528.126,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp9.826.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.826.126,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.826.126,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	Rp6.836.182,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.853.460,00	Rp1.982.722,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.836.182,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.972.862,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.477.480,00	Rp495.482,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.972.862,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Luran Jaminan Macaklaina Kerja bagi Non ASN	Rp162.072,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.080,00	Rp27.012,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.072,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp322.894,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.820,00	Rp124.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp322.894,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp486.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.032.120,00	Rp416.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp486.544,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp43.956.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.956.090,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp43.956.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.956.090,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.214.054.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.214.054.820,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp2.114.054.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.114.054.820,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Khusus	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Barang dan Jasa	Rp59.009.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.009.490,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Barang Pokok Habis	Rp59.009.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.009.490,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0024	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor-AktTulis Kambor	Rp113.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.890,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0025	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor- Kertas dan Cover	Rp3.891.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.891.200,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0026	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor- Bahan Cetak	Rp2.805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.805.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0029	Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kambor-Bahan Komputer	Rp716.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp716.480,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp48.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.488.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp113.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.046.420,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	BPJ - LS Daji			BPJ - LS Berang & Jasa			BPJ - UP/IG/UTU			Jumlah SPJ (LS + UP/IG/UTU) s.d Bulan ini	Sisa Pajut Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini		
5.1.02.02.01.0026	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp16.882.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Jamine/Waransi	Rp8.754.228,00	Rp0,00	Rp1.459.038,00	Rp7.295.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.754.228,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0026	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non-ASN	Rp4.459.428,00	Rp0,00	Rp3.716.190,00	Rp743.238,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.459.428,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0026	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non-ASN	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp40.518,00	Rp202.590,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.108,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0027	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non-ASN	Rp303.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.876,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non-ASN	Rp3.747.819,00	Rp0,00	Rp24.038,00	Rp3.723.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.771.819,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.948.000,00	Rp0,00
6.01.03	PROGRAM PERLUKUSAN KEBUJUKAN, PENLOMPONGAN DAN ASISTENSI	Rp3.832.875.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.832.875.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.832.875.880,00	Rp0,00
6.01.03.1.01	Penyusunan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp2.142.814.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.142.814.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.142.814.280,00	Rp0,00
6.01.03.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.008.420,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Ases/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ases/Utis Kantor	Rp7.088.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.088.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.088.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Ases/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kerbs dan Cover	Rp7.812.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.812.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.812.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Ases/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp311.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Ases/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Komputer	Rp7.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.498.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0088	Belanja Ases/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ases/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp23.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp120.948.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.948.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.948.420,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp112.192.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.192.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.192.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Waransi	Rp8.754.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.754.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.754.228,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0026	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non-ASN	Rp4.459.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.459.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.459.428,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Daji		SPJ - LS Barung & Jasa		SPJ - UPJADUTU		Jumlah SPJ (LS + UPJADUTU) s.d. Belanja	Saldo SPJ (LS + UPJADUTU) s.d. Belanja
			s.d. Belanja	Belanja	s.d. Belanja	Belanja	s.d. Belanja	Belanja		
5.1.02.02.02.0000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp243.198.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp243.198.000	Rp0.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp303.879.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp303.879.000	Rp0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.747.819.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.747.819.000	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Pengajaran Dinas	Rp277.842.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp277.842.000.000	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Pengajaran Dinas Dalam Negeri	Rp277.842.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp277.842.000.000	Rp0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Pengajaran Dinas Biasa	Rp277.842.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp277.842.000.000	Rp0.00
5.1.02.04.01.0002	Perumahan Kabupaten/kota/di Bawah Naungan/Pengawasan	Rp1.587.897.840.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.587.897.840.000	Rp0.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.587.897.840.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.587.897.840.000	Rp0.00
5.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.587.897.840.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.587.897.840.000	Rp0.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kambor	Rp209.554.184.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp209.554.184.000	Rp0.00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp209.554.184.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp209.554.184.000	Rp0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Keserasan	Rp1.378.343.656.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.378.343.656.000	Rp0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.747.819.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.747.819.000	Rp0.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp243.198.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp243.198.000	Rp0.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp303.879.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp303.879.000	Rp0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.747.819.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.747.819.000	Rp0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp1.089.776.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.089.776.000.000	Rp0.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus/Sosialisasi/Pelatihan	Rp1.089.776.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.089.776.000.000	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Pengajaran Dinas	Rp281.745.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp281.745.000.000	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Pengajaran Dinas Dalam Negeri	Rp281.745.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp281.745.000.000	Rp0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Pengajaran Dinas Biasa	Rp281.745.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp281.745.000.000	Rp0.00
5.1.02.04.01.0002	Pendampingan dan Bimbingan	Rp1.899.991.820.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.899.991.820.000	Rp0.00
5.1.02.05.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp59.275.120.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp59.275.120.000	Rp0.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.089.991.820.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.089.991.820.000	Rp0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.970.700.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp13.970.700.000	Rp0.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.970.700.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp13.970.700.000	Rp0.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Baku Habis	Rp13.970.700.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp13.970.700.000	Rp0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja AnekaBahan untuk Kegiatan Kambor/AMT/UIS Kambor	Rp2.529.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.529.000.000	Rp0.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja AnekaBahan untuk Kegiatan Kambor/Kelemb. Kerja dan Corner	Rp1.150.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.150.000.000	Rp0.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja AnekaBahan untuk Kegiatan Kambor/Brinda Pos	Rp1.000.000.000	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.000.000.000	Rp0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Daji		SPJ - LS Bening & Jasa		SPJ - UPRIGUTU		Jumlah SPJ (L.S + UPRIGUTU) s.d Bulan ini	Sisa Page Anggaran	
			s.d Bulan Laku	Bulan ini	s.d Bulan Laku	Bulan ini	s.d Bulan ini	Bulan ini			
5.1.02.01.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer	Rp4.430.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3721.000.00	Rp709.800.00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.988.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.837.900.00	Rp3.150.100.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp119.048.420.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp113.048.420.00	Rp5.991.000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp104.292.182.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp104.292.182.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaaw Acara, dan Panitia	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0008	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.292.182.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Auransi	Rp8.744.228.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.744.228.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.459.428.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.459.428.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Luran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp243.108.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp243.108.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp303.878.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp303.878.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Luran Jaminan Hari Tua bagi Non-ASN	Rp3.747.918.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.747.918.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp453.258.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp453.258.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp453.258.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp299.881.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp299.881.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp299.881.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.620.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.820.300.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Arifitahun untuk Kegiatan Honorar-Kat Tulis Kembang	Rp1.818.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover	Rp1.883.800.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Berkas Pas	Rp144.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp8.844.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.400.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp100.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaaw Acara, dan Panitia	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Konsultansi Non Konsultasi	Rp100.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Rp100.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp184.341.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Daji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPKERTU		Jumlah SPJ (LS + UPKERTU) s.d. Bilan ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bilan Laba	Bilain bi	s.d. Bilan Laba	Bilain bi	s.d. Bilan Laba	Bilain bi		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp184.341.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.120.000,00	Rp0,00	Rp101.860.382,00	Rp192.500,00	Rp184.691.382,00	Rp40.908.618,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp184.341.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.120.000,00	Rp0,00	Rp101.860.382,00	Rp192.500,00	Rp184.691.382,00	Rp40.908.618,00
0.01.09.1.02.0003	Kontribusi, Membayar dan Emulasi serta Verifikasi Penggantian dan Penbertanahan Korasi	Rp99.999.999.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.882.000,00	Rp91.117.000,00
5.1	SELALU OPERASI	Rp99.999.999.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.882.000,00	Rp91.117.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp99.999.999.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.882.000,00	Rp91.117.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp127.938.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.882.000,00	Rp96.056.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Peralihan	Rp127.938.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.882.000,00	Rp96.056.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Atributan untuk Kegiatan Honor-ArtTua Kantor	Rp28.017.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.017.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Atributan untuk Kegiatan Honor-Kerab dan Cover	Rp3.881.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.881.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Atributan untuk Kegiatan Honor-Bahan Komputer	Rp2.982.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.982.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Atributan untuk Kegiatan Honor-Atributan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp218.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.900,00
5.1.02.01.01.0092	Belanja Honorarium dan Tunjangan Pegawai	Rp1.638.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.882.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.882.000,00	Rp1.638.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp666.338.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.800.000,00	Rp0,00	Rp207.987.270,00	Rp201.230.828,00	Rp284.017.098,00	Rp40.308.202,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp666.338.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.800.000,00	Rp0,00	Rp207.987.270,00	Rp201.230.828,00	Rp284.017.098,00	Rp40.308.202,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp666.338.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.800.000,00	Rp0,00	Rp207.987.270,00	Rp201.230.828,00	Rp284.017.098,00	Rp40.308.202,00
0.01.09.1.02.0004	Pendaftaran, Asistensi dan Verifikasi Penggantian Insigras	Rp139.728.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.728.200,00
5.1	SELALU OPERASI	Rp139.728.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.728.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp139.728.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.728.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.819.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.819.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Peralihan	Rp16.819.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.819.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Atributan untuk Kegiatan Honor-ArtTua Kantor	Rp1.608.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.608.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Atributan untuk Kegiatan Honor-Kerab dan Cover	Rp1.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.908.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.908.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Daji		SPJ - LS Barrang & Jasa		SPJ - UPKUMU		Jumlah SPJ (LS + UPKUMU s.d. Bulan ini)	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp74.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp74.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.900.000,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp74.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.900.000,00	Rp0,00
Penjelasan:										
- BP2D:										
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
OU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp10.289.000.031,00	Rp1.482.322.033,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.771.322.064,00	Rp0,00
- Pokrangan:										
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp 980.020.330,00	Rp 10.980.943,00	Rp 188.408.273,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 1.069.351.546,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp213.748,00	Rp0,00	Rp213.748,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.496,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp140.200,00	Rp0,00	Rp140.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.400,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS			Rp0,00	Rp447.771,00	Rp447.771,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp895.542,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp447.771,00	Rp0,00	Rp447.771,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp895.542,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp82.845.802,00	Rp0,00	Rp82.845.802,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.691.604,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja			Rp9.938.170,00	Rp0,00	Rp9.938.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.876.340,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kesehatan			Rp20.817.668,00	Rp2.794.828,00	Rp23.612.496,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.224.992,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp9.200.190,00	Rp1.709.894,00	Rp10.910.084,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.819.978,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungsim Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungsim Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Tabung			Rp 81.027.244,00	Rp 16.826.172,00	Rp 97.853.416,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 114.679.588,00	Rp0,00
17. Jalan			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Barang (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zekat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pokrangan			Rp104.452.719,00	Rp1.482.322,00	Rp105.935.041,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.417.363,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	SPJ - LS Daji		SPJ - LS Beringin & Jase		SPJ - UPRUMTU		Jumlah SPJ (LS + UPRUMTU) s.d Bulan Ini	Sisa Page Anggaran	
		s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini			
- Pajak:										
1. Pajak Pembelian Ntal		Rp0,00	Rp0,00	Rp170.878.030,00	Rp0,00	Rp253.026.000,00	Rc188.198,00	Rp47.764.091,20	Rp268.243.190,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Pa 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp17.892.744,00	Rp0,00	Rp3.239.810,00	Rp0,00	Rp4.294.485,00	Rp25.982.742,00	Rp0,00
3. PPh 21		Rp1.223.331.864,00	Rp87.773.426,00	Rp8.380.000,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	Rp1.853.500,00	Rp1.321.038.780,00	Rp0,00
4. Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Karyawan PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Karyawan PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Pa 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp3.887.884,00	Rp0,00	Rp3.887.884,00	Rp0,00	Rp7.989.816,00	Rp11.877.280,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Pa 20		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Pa 20		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Pa 4 (2)		Rp0,00	Rp0,00	Rp3.117.780,00	Rp0,00	Rp3.117.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.769.897,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Pa Ph 15		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak		Rp1.223.331.864,00	Rp87.773.426,00	Rp204.992.632,00	Rp0,00	Rp252.699.878,00	Rp0,00	Rp51.246.882,00	Rp1.635.237.868,00	Rp0,00
JUMLAH PEREMBAH SP2D BRUTO		Rp8.289.006.031,00	Rp1.482.322.933,00	Rp1.878.183.527,50	Rp0,00	Rp7.648.991.543,80	Rp0,00	Rp4.646.843.126,00	Rp33.884.837.890,00	Rp0,00
- Pengeluaran:										
- SPJ:										
UPIGU		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.829.203.847,20	Rp4.829.203.847,20	Rp0,00
TU		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.261.693,00	Rp33.261.693,00	Rp0,00
LS		Rp19.289.808.031,00	Rp1.482.322.933,00	Rp8.878.183.527,50	Rp0,00	Rp7.770.808.915,80	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.420.919.067,00	Rp0,00
- Pelanggaran:										
1. Iuran Wajib Pegawai 4%		Rp189.020.330,00	Rp13.485.843,00	Rp188.186.27,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.498.278,00	Rp0,00
2. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp13.745,00	Rp0,00	Rp13.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.745,00	Rp0,00
3. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS		Rp19.289,00	Rp0,00	Rp19.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.289,00	Rp0,00
5. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp17.771,00	Rp0,00	Rp18.882,00	Rp0,00	Rp2.205,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.987,00	Rp0,00
7. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp42.343.892,00	Rp0,00	Rp42.343.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.343.892,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja		Rp9.899.170,00	Rp0,00	Rp9.899.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.899.170,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kesehatan		Rp2.317.866,00	Rp0,00	Rp2.317.866,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.317.866,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp3.200.198,00	Rp0,00	Rp3.200.198,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.198,00	Rp0,00
13. Biaya Iuran Smpangan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran		SPJ - LS (Sj)		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UPI/GITU		Jumlah SPJ (LS + UPI/GITU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
		s.d Bulan Laku	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	Bulan Ini	s.d Bulan Laku	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	Bulan Ini		
14. Belanja Iuran Smpatan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Tabung		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Tabung		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Asas		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Bers (BULLO)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zawat		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Podongan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Pajak:											
1. Pajak Pembebasan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Pa 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. PPH 21		Rp1.223.831.864,00	Rp87.773.422,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00
4. Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PHS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Pa 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Pa 25		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Pa 26		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Pa 4 (2)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Pa 15		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak		Rp1.223.831.864,00	Rp87.773.422,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00	Rp1.311.605.286,00	Rp0,00
- SPJ (Retro):											
UPI/GU		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
TU		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (SIS)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGEMBALIAN		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Dari Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar **Rp. 37.022.649.590,00** terserap sebesar **Rp. 34.080.531.555,00** atau **92,05 %**.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2024-2026.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah membuat laporan kinerja yang telah dicapai selama setahun.
3. Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah memperoleh nilai **100 %**.
4. Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 37.022.649.590 terserap sebesar Rp. 34.080.531.555,00 atau 92,05 %.

B. TINJAUAN KHUSUS

Meskipun Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan kepada unit masing-masing sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sebelumnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Namun demikian masih terdapat kekurangan terutama dalam koordinasi untuk tercapainya laporan maksimal, salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi, agar laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

C. SARAN

Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk tahun–tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Laporan tahunan unit kerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
2. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan sangat efektif, efisien dan Akuntabel.
3. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi setiap tingkatan organisasi sebagai salah satu wujud akuntabilitas kedepan diharapkan adanya pengolahan data kinerja yang mencakup penetapan data dasar (baseline data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data melalui data elektronik.
4. Untuk mencapai kinerja yang baik dari setiap unit kerja maka perlu adanya penegakan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, Pebruari 2025

INSPEKTUR PROVINSI BALI,



I WAYAN SUGIADA

Nip. 19651231 198603 1 175

C. SARAN

Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Laporan tahunan unit kerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
2. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan sangat efektif, efisien dan Akuntabel.
3. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi setiap tingkatan organisasi sebagai salah satu wujud akuntabilitas kedepan diharapkan adanya pengolahan data kinerja yang mencakup penetapan data dasar (baseline data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data melalui data elektronik.
4. Untuk mencapai kinerja yang baik dari setiap unit kerja maka perlu adanya penegakan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, Pebruari 2025

INSPEKTUR PROVINSI BALI,


I WAYAN SUGIADA

Nip. 19651231 198603 1 175